



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 106/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 29
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI
PAPUA BARAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA BARAT
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 5 MARET 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 106/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Samsudin Anggiluli

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pemerintah Provinsi Papua Barat (VI)

**Selasa, 5 Maret 2024, Pukul 10.39 – 11.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Samsudin Anggiluli
2. James Tipawael
3. Theodosius A.H. Thesia
4. Riyan Eko
5. Bagus Yulian Kaiwai
6. Yulian Saru
7. Luther Ajamsaru

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Janses E. Sihaloho
2. Ecoline Situmorang
3. Anton Febrianto
4. Arif Suherman
5. Markus Manumpak Sagala
6. Patrice Rio Capella

C. Pemerintah:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Ibrahim Reza | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 4. Khumaidi | (Kemenkumham) |
| 5. Wahyu Jaya | (Kemenkumham) |
| 6. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 7. Heny Ernawati | (Kemendagri) |
| 8. Hanafi | (Kemendagri) |
| 9. M. Ibnu Athoillah | (Kemendagri) |
| 10. Ryantonni | (Kemendagri) |

D. Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Ali Baham Temongmere | (Papua Barat) |
| 2. Anhar Akib Kadar | (Papua Barat Daya) |
| 3. Fadlun Bauw | (Papua Barat Daya) |
| 4. Baharudin A. Canno | (Papua Barat Daya) |
| 5. Cliff A. Japsenang | (Bupati Sorong) |
| 6. Adi Bremantyo | (Bupati Sorong) |

7. Donar Taluke
8. Demianus Aru

(Bupati Sorong)
(Bupati Sorong)

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.39 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [00:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin memperkenalkan yang hadir, Yang Mulia.

Prinsipal sendiri ada Bapak Bupati Sorong Selatan, Bapak Samsudin Anggililu[*sic!*]. Ada juga jajarannya hadir, Bapak James Tipawael, Bapak Theodosius Thesia, Bapak Riyan Eko. Ada juga, Yang Mulia, tokoh masyarakat itu, ada Bagus Yulian ... Yulian Saru, dan Luther Ajamsaru, ada tokoh masyarakat juga yang hadir. Dan kuasa yang hadir sebelah kiri saya Bapak Rio Capella, saya Janses E. Sihalo, Ecoline Situmorang, Markus Sagala, Anton Febrianto, dan Arief Suherman. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:20]

Baik. Dari Pemerintah atau Presiden?

4. PEMERINTAH: PURWOKO [01:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden hadir, dari sebelah kanan Bapak Ibrahim Reja, kemudian Bapak Wahyu Jaya, Bapak Ahmad Kumaidi, dan Bapak Surdianto, saya sendiri Purwoko. Sebelah kiri saya, Bu Puti Dwi Jayanti, kemudian M. Ibnu Athoillah, kemudian di belakang ada Bu Heny Ernawati, dan Bapak Riyan. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:53]

Baik. Dari Pihak Terkait Gubernur Papua Barat Daya?

6. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT DAYA: ANHAR AKIB KADAR [02:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr, wb. Selamat siang.

Yang mewakili Kuasa Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, saya sendiri Anhar Akib Kadar, S. STP., M.Si, kemudian Pak Fadlun Bauw, S.H., dan Baharudin A. Canno, S.H. Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Baik. Dari Bupati Sorong?

8. PIHAK TERKAIT BUPATI SORONG: DONAR TALUKE [02:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, kami hari ini langsung oleh Pak Plh Bupati Sorong, Pak Cliff Agus Japsenang. Kemudian, Asisten I, Pak Adi Bremantyo, selanjutnya Pak Kabag Hukum, Pak Demianus Aru, S.H. dan saya sendiri Dr. Donar Taluke. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:39]

Dari Gubernur Papua Barat? Yang online, Pak, bisa mendengar?

10. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [02:47]

Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:49]

Walaikumsalam wr. wb.

12. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [02:51]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Pejabat Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, beserta Kepala Biro Hukum. Kami daring dari Kantor Gubernur Papua Barat.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:07]

Baik.

14. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [03:07]

Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:08]

Terima kasih. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat. Bapak sudah siap keterangannya?

16. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [03:25]

Butuh 5 menit lagi, Pak, sedang disiapkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Oh, tidak ada keterangan tertulisnya?

18. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [03:31]

Tinggal ... lagi disiapkan, Pak.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:33]

Oh, sedang dipersiapkan?

20. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [03:35]

Ya, 5 menit, Pak.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:36]

5 menit. Jadi, bagaimana 5 menit ke depan ini kita? Baik. Kalau begitu, kita sahkan untuk bukti dari Pemohon. Pemohon menyerahkan bukti P-72 sampai P-75, ya, Pak? Betul? Pemohon? Baik. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Itu kantor gubernur bagian apa itu, Pak? Ini bagian conference room-nya atau apa? Bagus ruangnya?

22. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [04:15]

Ini conference room-nya, ya, ya. Ini langsung di kantor gubernur, di conference room-nya.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:19]

Oh. Yang biasa untuk meeting-meeting di sini ya, Pak?

24. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [04:24]

Ini yang Zoom dengan Bapak Menteri Dalam Negeri untuk inflasi dan sebagainya di tempat itu.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:32]

Sudah berapa lama Bapak jadi pejabat?

26. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [04:37]

Sejak 1 November 2023.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:41]

November 2023?

28. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [04:44]

2023. Baru menjelang 4 bulan.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:46]

Oh. Apa ada evaluasi secara reguler, Pak? Dari Kementerian Dalam Negeri?

30. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [04:55]

Untuk materi ini belum sempat kami bahas. Saya selama 4 bulan belum masuk ke materi. Jadi baru kemarin kami mendapatkan informasi

dan kami minta untuk disiapkan materinya agar nanti bisa kami sampaikan pada kesempatan.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:14]

Bukan.

Untuk jabatan-jabatan si Bapak itu ada evaluasi rutin dari Kemendagri, tidak?

32. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [05:21]

Itu evaluasi 3 bulan, Pak. 3 bulan kemarin (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [05:24]

3 bulanan, ya?

34. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [05:26]

Ya. 1 Februari, Pak.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:28]

1 Februari?

36. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [05:30]

1 Februari. Itu di bulan pertama.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:33]

Baik.

Lain kali harus sudah dipersiapkan sebelumnya, Pak. Karena ini kan pemberitahuan sudah lama ini, sudah beberapa hari sebelumnya. Untuk ... kenapa Bapak enggak tugaskan Kuasa Hukum atau Bapak sendiri ke Jakarta ini?

38. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [06:08]

Ya, Pak, siap. Karena ada kegiatan yang di sini sehingga saya tidak bisa meninggalkan provinsi.

39. KETUA: SUHARTOYO [06:17]

Kan bisa menunjuk Kuasa Hukum seperti dari Papua Barat Daya, dari Bupati Sorong, Bupati ... kalau yang selatan memang sudah pakai kuasa hukum.

40. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [06:35]

Ya.

41. KETUA: SUHARTOYO [06:36]

Sudah 5 menit ini, Pak. Beda, ya?

42. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [06:44]

Ya. Baik. Ya, sambil menunggu materi yang lengkap, perlu ... kami menjelaskan saja. Ini kami menjelaskan saja (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [06:54]

Ya. Bisa ... suaranya tidak terlalu ngebas bisa tidak, Pak? Suaranya menggaung, agak menggema. Atau dari kita, ya?

44. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [07:06]

Ya.

45. KETUA: SUHARTOYO [07:11]

Silakan, Pak. Apa yang mau dijelaskan?

46. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [07:14]

Ya. Yang pertama tentang proses ini tentunya telah dilaksanakan, ya. Kaitannya dengan Kampung Botain, ya. Kampung Botain yang menjadi pembahasan masuk di wilayah Sorong atukah di Sorong Selatan. Ini tentunya dari Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai provinsi induk telah memfasilitasinya ... memfasilitasinya dan selanjutnya tentunya ... apa namanya ... kami persilakan dari pemerintah pusat Kemendagri tentunya karena ini sudah ada di ranahnya wilayah provinsi

Papua Barat Daya, maka selanjutnya yang kemudian berwenang untuk ... apa namanya ... menyampaikan data tentang Kampung Botain ini, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [08:24]

Itu saja, Pak?

48. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [08:25]

Itu saja selengkapnya.

49. KETUA: SUHARTOYO [08:28]

Nah, itu. Baik, dari Hakim ada yang mau ditanyakan untuk keterangan Gubernur Provinsi Papua Barat? Prof. Arief, silakan Prof.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [08:45]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Jadi, keterangannya karena sangat pendek Pak Gubernur, saya minta supaya keterangan yang sudah disampaikan secara lisan dilengkapi dengan keterangan tertulis secara lengkap.

51. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [09:00]

Baik, siap, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [09:06]

Terus yang kedua, apakah sudah ada upaya-upaya dari kantor Gubernur Papua Barat, baik melalui langsung Pak Gubernur atau melalui aparat di kantor Gubernur untuk menyelesaikan masalah-masalah ini? Silakan dijawab, Pak.

53. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [09:24]

Siap, Yang Mulia. Ya, memang karena dalam 3 bulan pertama ini mohon izin sebelum bicara spesifik, saya membahas tentang kaitannya dengan ... apa namanya ... status Kampung Botain ini, Pak. Ini saya belum ... jadi sekali lagi saya butuh untuk kemudian membahas secara khusus kalau kaitannya dengan Kampung Botain ini, tetapi apa yang

telah dilaksanakan sebelumnya yang saya informasikan bahwa sesungguhnya kewenangan selanjutnya itu sudah berada pada Kemendagri karena sudah masuk pada wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Demikian, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [10:06]

Oke, Pak, tinggal kita menunggu laporan secara lengkapnya ya, Pak Gubernur ya.

55. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [10:11]

Baik, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [10:12]

Kalau Pak Gubernur sendiri sekarang berkantor di mana kalau yang Papua Barat?

57. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [10:17]

Di kantor gubernur, sekarang di Manokwari, Pak.

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [10:19]

Di kotanya?

59. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [10:24]

Manokwari.

60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [10:22]

Manokwari. Kalau Papua Barat di Sorong, ya?

61. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [10:26]

Bukan, Papua Barat di Manokwari.

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [10:28]

Di Papua Barat Daya di Sorong?

63. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [10:30]

Ya, Papua Barat Daya di Sorong.

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [10:34]

Oke, baik. Terima kasih, Pak Gubernur. Saya kembalikan Pak Ketua.

65. KETUA: SUHARTOYO [10:39]

Baik, Prof. Baik ini tidak ada lagi dari Hakim. Nah, kemudian dari ... silakan, Prof.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Gubernur, jadi begini Pak Gubernur, kalau melihat rangkaian persidangan kemarin itu saya juga sempat menanyakan ke Gubernur Papua Barat Daya, tetapi mereka tidak memberikan jawaban yang komprehensif, hanya menyatakan terkait dengan persoalan penyelenggaraan pemilu saja yang mereka jelaskan. Jadi, yang terkait dengan kronologis bagaimana kemudian ... apa namanya ... kewenangan gubernur di dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antardaerah, itu kan ada proses panjangnya di situ, Pak. Nah, proses panjang itu yang sebetulnya ingin kami dengar di dalam persidangan ini sebetulnya, Pak. Apa yang sudah dilakukan setiap tahapan itu dan apa hasilnya dari semua itu, sehingga sampai hari ini belum kemudian selesai persoalan yang terjadi di Kampung Botain itu. Itu sebetulnya kami ingin dengarkan Pak. Nah, itu tadi Bapak menyampaikan hanya sangat singkat sekali, sehingga kami tidak mendapatkan apa-apa sebetulnya di situ. Ya, ini tolong nanti Bapak bisa menjelaskan secara kronologis tahapan-tahapan dari awal. Sehingga yang sekarang kemudian karena ada pemekaran kemudian ke Papua Barat Daya, itu ... apa namanya ... limbahnya seperti apa dari yang dilakukan oleh Papua Barat ini? Jadi, mohon itu untuk dilengkapi betul, Pak Gubernur, ya. Terima kasih.

67. KETUA: SUHARTOYO [12:23]

Silakan, Yang Mulia. Masih ada, Pak Gubernur, mohon diperhatikan.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pak Gubernur Papua Barat, ini terima kasih untuk keterangannya, walaupun kami belum dapat lengkap ini. Mungkin bisa diberikan informasi dulu, Pak Gubernur. Sebelum Pak Gubernur jadi Pejabat Gubernur Papua Barat, jabatan Bapak apa, ya?

69. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [12:52]

Sebelumnya saya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Fak-Fak di Provinsi Papua Barat.

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:58]

Oh, Sekda Kabupaten Fak-Fak, ya?

71. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [13:01]

Ya.

72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:02]

Oke.

73. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [13:03]

(Ucapan tidak terdengar jelas) Sekda Provinsi Papua Barat dan tentunya waktunya singkat dan setelah itu menjadi pejabat Gubernur.

74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:14]

Oh, jadi Bapak dari Sekda Fak-Fak, jadi Sekda Papua Barat, baru jadi pejabat, ya?

75. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [13:14]

Siap, ya.

76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:14]

Oke. Tadi apa yang disampaikan Yang Mulia Prof. Enny, itu memang kami sangat butuh, Pak, informasi itu, terkait dengan persoalan ini. Nah, mungkin Pak Gubernur bisa memberi informasi tambahan, Pak Gubernur. Apakah dalam pemekaran kabupaten, ya, di Papua Barat sebelum adanya Papua Barat Daya itu, apakah ada persoalan yang lain atau tidak ada? Jadi satu-satunya ini, yang soal sekarang ini. Kalau misalnya ada informasi itu nanti, Pak Pejabat ... Pak Gubernur bisa memberi informasi tambahan, ya, karena banyak sekali hal-hal ketika pemekaran ini kan, terjadi ada konflik, baik karena persoalan sumber daya alam, bisa karena persoalan masyarakat adat, banyak sekali faktornya.

Nah, pada waktu pemekaran wilayah di Provinsi Papua Barat sebelum ada Papua Barat Daya itu, apakah selain yang di Sorong Selatan ini ada yang lain atau tidak? Mungkin nanti itu informasi tambahan saja, ya, Pak Gubernur, karena Pak Gubernur pasti membutuhkan data terkait dengan proses karena proses itu berlangsung sebelum Bapak jadi pejabat Gubernur.

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

77. KETUA: SUHARTOYO [14:45]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Itu ya, Pak Gubernur Papua Barat, untuk dicermati nanti keterangannya secara tertulis, ditunggu ya, Pak?

78. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [14:59]

Ya, siap, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [15:01]

Ditunggu nanti akan kami jadikan pertimbangan, bersama-sama dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang melibatkan beberapa pihak, termasuk Gubernur Papua Barat Daya dan juga Pemerintah Bupati Sorong maupun Sorong Selatan.

Baik. Dengan demikian (...)

80. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [15:23]

Yang Mulia, izin Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, dari Kuasa Pemohon.

81. KETUA: SUHARTOYO [15:27]

Mau apa?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [15:28]

Yang Mulia, kebetulan pas sidang-sidang sebelumnya, ada beberapa hal yang dipertanyakan oleh Yang Mulia yang tidak bisa kami jawab sepenuhnya. Nah, kebetulan hadir Prinsipal Bapak Bupati. Kebetulan Bapak Bupati ini yang terlibat dari awal sampai proses terakhir perundingan-perundingan itu, Yang Mulia. Mungkin kalau ada kesempatan, supaya Beliau bisa menyampaikan hal-hal yang belum pernah terungkap, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [15:54]

Ya, kan nanti ... ini masih ada kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, kan bisa diakomodir di situ, kecuali memang masih ada catatan yang belum bisa dijawab ketika persidangan sebelumnya yang secara spesifik artinya.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [16:11]

Ada, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [16:11]

Ada?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [16:11]

Seperti fakta-fakta kemarin ada miss pertemuan-pertemuan itu, Yang Mulia. Itu yang bisa menjawab itu hanya Beliau, karena Beliau yang hadir semua, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [16:20]

Silakan! Tapi jangan terlalu lama.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [16:23]

Baik, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [16:23]

Silakan, Pak Bupati!

90. PEMOHON: SAMSUDIN ANGGILULI [16:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Hakim Konstitusi. Saya ingin menambahkan, mempertegas fakta-fakta data yang sudah disampaikan lewat teman-teman di pengacara. Pertama tahun 2018 sebelum Permendagri 2019 keluar, itu pertemuan kami yang terakhir dengan Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat, memfasilitasi Bupati Sorong Selatan, Bupati Kabupaten Sorong. Memang tidak ada kesepakatan, tidak ada persetujuan antara masyarakat yang ada di Sorong Selatan dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong. Maka Bapak Gubernur, kita sepakat untuk melakukan pertemuan di Kabupaten Sorong Selatan, itu di Distrik Saifi. Dan Bapak Gubernur menunjuk Bapak Asisten I Bidang Pemerintahan, Bapak Musa Kamudi, hadir di Sorong Selatan untuk mendengar aspirasi secara langsung dari masyarakat yang ada di Kampung Botain dan juga ada beberapa kampung yang ada di Distrik Saifi atau Kabupaten Sorong Selatan. Dan hari itu, Ketua Yang Mulia, masyarakat menyampaikan bahwa kami itu adalah asli masyarakat yang ada di Kampung Botain. Kami bukan masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong. Dan itu dilakukan di dalam gereja (...)

91. KETUA: SUHARTOYO [18:18]

Ya, bisa dianu ... Pak, diambil kesimpulannya pada akhirnya bagaimana?

92. PEMOHON: SAMSUDIN ANGGILULI [18:23]

Akhirnya masyarakat menyatakan bahwa mereka adalah bagian dari Sorong Selatan.

93. KETUA: SUHARTOYO [18:28]

Ya. Terus secara formal, langkah-langkah yang sudah pernah ditempuh itu hasilnya seperti apa?

94. PEMOHON: SAMSUDIN ANGGILULI [18:35]

Ya, kita ... siap. Jadi, saya selama menjadi Wakil Bupati itu kan kita sudah melakukan langkah-langkah itu. Dengan bapak gubernur, bapak mantan gubernur almarhum, Bapak Abraham Atururi, kemudian juga Bapak (...)

95. KETUA: SUHARTOYO [18:50]

Tidak ada titik temu ya, Pak?

96. PEMOHON: SAMSUDIN ANGGILULI [18:51]

Siap. Tidak ada titik temu.

97. KETUA: SUHARTOYO [18:52]

Nah, sekarang setelah ada Papua Barat Daya, dari Gubernur Papua Barat Daya masih menggantungkan putusan ini karena menunggu setelah selesai pemilu itu.

98. PEMOHON: SAMSUDIN ANGGILULI [19:05]

Siap.

99. KETUA: SUHARTOYO [19:08]

Itu betul? Memang setelah itu belum ada, yang konon di terakhir di pertemuan itu, pemerintah Gubernur Papua Barat Daya masih menunggu setelah kondisi selesai atau pascapemilu ini kondusif akan dilanjutkan kembali, yang ada poin-poin yang kemudian dianggap masih krusial yang belum diputuskan. Betul ya, Pak?

100. PEMOHON: SAMSUDIN ANGGILULI [19:32]

Siap, benar.

101. KETUA: SUHARTOYO [19:34]

Baik. Jadi, memang sekarang sudah ada peralihan dari Papua Barat ke Barat Daya yang sudah dimulai ya, Pak. Cuma masih ada step-step yang menunggu. Apa lagi, Pak? Satu ... satu ... apa ... penjelasan lagi kalau masih ada saya ... kami anu.

102. PEMOHON: SAMSUDIN ANGGILULI [19:57]

Kami sudah melakukan upaya-upaya dengan provinsi, tapi juga dengan Kemendagri, terus kami ketemu dengan bapak gubernur menyurati Kemendagri untuk menunda pelaksanaan permendagri.

103. KETUA: SUHARTOYO [20:11]

Ya.

104. PEMOHON: SAMSUDIN ANGGILULI [20:11]

Tapi, sampai ... ndak ada titik apa ... terang dan kami sebagai warga negara datang ke hadapan bapak untuk (...)

105. KETUA: SUHARTOYO [20:20]

Kalau menurut Bapak penyelesaian ke depan yang masih di apa ... masih di ... akan difasilitasi oleh Gubernur Papua Barat Daya, itu perlu tidak melibatkan Papua Barat ... Gubernur Papua Barat?

106. PEMOHON: SAMSUDIN ANGGILULI [20:33]

Tidak perlu mungkin dengan Bapak Gubernur Papua Barat (...)

107. KETUA: SUHARTOYO [20:36]

Tidak perlu, ya? Karena konkretnya sekarang sudah di bawah Papua Barat Daya?

108. PEMOHON: SAMSUDIN ANGGILULI [20:40]

Siap. Siap.

109. KETUA: SUHARTOYO [20:00]

Baik, itu nanti kami jadikan pertimbangan untuk bagaimana menyikapi Permohonan ini.

110. PEMOHON: SAMSUDIN ANGGILULI [20:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [20:48]

Baik, terima kasih, Pak Bupati ... Bupati Sorong ... Sorong Selatan, ya?

112. PEMOHON: SAMSUDIN ANGGILULI [20:52]

Siap.

113. KETUA: SUHARTOYO [20:52]

Ya, maksudnya Sorong dan Sorong Selatan itu supaya menyatu artinya (...)

114. PEMOHON: SAMSUDIN ANGGILULI [20:58]

Siap, terima kasih. Siap, siap.

115. KETUA: SUHARTOYO [20:59]

Nah, itu. Jadi Hakim pun ini secara natural, supaya kekeluargaannya itu kemudian (...)

116. PEMOHON: SAMSUDIN ANGGILULI [21:08]

Amin, amin.

117. KETUA: SUHARTOYO [21:08]

Jangan beda-bedakan antara ... boleh wilayahnya terbagi, tapi hatinya mestinya tetap satu, Pak. Indonesia.

118. PEMOHON: SAMSUDIN ANGGILULI [21:15]

Siap. Siap.

119. KETUA: SUHARTOYO [21:16]

Mau dipakai Sorong Selatan, mau dipakai Sorong kan sebenarnya juga untuk kita juga kan sebenarnya? Untuk anak cucu kita sebenarnya. Kenapa kita yang elite yang di atas ini kok ... nah, tapi itu bisa jadi di tingkat ... tingkat yang di bawah beda, ya, beda. Ada kemantapan hati yang mungkin ... baik, dengan demikian sidang hari ini sudah dianggap cukup. Jika masih ada yang ingin mengajukan ahli/saksi silakan diajukan secara tertulis, kemudian digabung dengan kesimpulan, kesimpulan

sidang yang diagendakan untuk kesimpulan nanti di paling lambat diserahkan kepada Mahkamah hari Jumat, 15 Maret 2024, pukul 10.00 WIB. Di situ bisa dinarasikan semua hasil-hasil persidangan, termasuk kalau ada hal-hal baru yang ingin disampaikan, termasuk juga kalau ada yang akan memperkuat dengan keterangan ahli atau keterangan saksi dilampirkan sekalian. Agar kami bisa mengambil putusan berdasarkan kesimpulan itu juga karena kesimpulan bagian dari rangkaian fakta-fakta juga. Meskipun tidak wajib, tapi sebaiknya memang idealnya kesimpulan itu ada.

Baik, termasuk Pak Gubernur Papua Barat, ya, Pak. Keteranganannya nanti ditunggu hingga tanggal 15 Maret 2024, pukul 10.00 WIB.

120. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [23:05]

Siap, Yang Mulia.

121. KETUA: SUHARTOYO [23:05]

Bapak tinggal koordinasi dengan staf supaya apa ... kalau ada hal-hal yang akan dijadikan bagian dari keterangan secara komprehensif Bapak, Bapak bisa membuka Risalah Sidang terkait dengan perkara ini yang selalu tercover di apa ... di Risalah Sidang, lengkap.

122. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [23:31]

Siap, Yang Mulia.

123. KETUA: SUHARTOYO [23:31]

Karena setiap persidangan ini langsung dimuat di dalam web Mahkamah Konstitusi tentang timeline persidangan ini.
Baik.

124. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [23:44]

Izin, Yang Mulia? Mohon izin, Yang Mulia?

125. KETUA: SUHARTOYO [23:45]

Ya?

126. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT: ALI BAHAM TEMONGMERE [23:45]

Dari Papua Barat Daya.

Mohon izin, Yang Mulia, sidang yang lalu itu, Yang Mulia menyampaikan apakah gubernur ... Penjabat Gubernur Papua Barat Daya bersedia untuk memfasilitasi mediasi untuk penyelesaian batas antara Sorsel dan Sorong. Mungkin izinkan kami menyampaikan pernyataan dari Bapak Gub. Bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersedia untuk memfasilitasi pertemuan tersebut, guna penyelesaian sengketa batas wilayah di Kampung Botain yang merupakan objek sengketa. Salah satu bentuk awal, langkah awal yang beliau lakukan, yaitu mengundang Bapak Bupati Sorong Selatan dan Plh Bupati Sorong pada tanggal 2 Maret 2024 kemarin, Bapak Yang Mulia, di Kabupaten Sorong.

127. KETUA: SUHARTOYO [24:39]

Sudah?

128. PIHAK TERKAIT PAPUA BARAT DAYA: ANHAR AKIB KADAR [24:39]

Sudah. Sebagai langkah awal untuk membahas terkait permasalahan batas daerah kedua wilayah tersebut. Dan disepakati akan diselesaikan melalui mediasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta tentunya berkonsultasi dengan Ditjen Adwil Kemendagri.

Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan.

129. KETUA: SUHARTOYO [25:01]

Oh, ya. Baik, kalau itu, bisa diselesaikan 10 sampai 15 Maret batas kesimpulan, kan nanti Bapak lampirkan sekalian hasil pertemuan itu. Sekaligus, kami ... kami kemarin tidak memerintahkan untuk ... kami hanya ... apakah Bapak bisa menggunakan kesempatan untuk penyelesaian itu sebelum kami sidang hari ini? Supaya kami menundanya agak ... agak lama, guna memenuhi apa yang disampaikan Keterangan Bapak ... di Keterangan Bapak itu. Bahwa ini memang sudah menjadi ... apa ... keputusan akan diselesaikan setelah pemilu. Cuma Bapak waktu itu kan, tidak sanggup karena harus koordinasi dengan Pak Gubernur segala macam.

Nah, sekarang baru ... sudah tanggal 2, diselenggarakan. Nah, nanti seandainya sebelum tanggal 15 ini sudah ada gambaran, Bapak cantumkan, bagaimana ... apa ... progresnya? Sehingga, kami akan memutus. Mungkin agak ... agak ... apa ... perhitungan waktunya agak

panjang sedikit sambil menunggu mungkin proses-proses yang Bapak bisa lakukan itu. Daripada nanti kami buka lagi sidang, kan, jadi kurang efisien juga. Peradilan cepat, sederhananya, juga jadi kurang terimplementasi.

Baik, ya, Bapak, ya (...)

130. KUASA HUKUM PEMOHON: PATRICE RIO CAPELLA [26:27]

Izin, Yang Mulia. Menanggapi ini sedikit dari Papua Barat Daya. Kami dari Sorong Selatan menyambut baik kalau memang ada niat dari Gubernur Papua Barat Daya untuk mempertemukan kembali. Cuma, ini kan persoalannya adalah berkaitan dengan pihak Kemendagri. Apakah kemudian Gubernur Papua Barat Daya Plh bisa berhadapan dengan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan atasan dari Plh Gubernur Papua Barat?

131. KETUA: SUHARTOYO [27:01]

Ya.

132. KUASA HUKUM PEMOHON: PATRICE RIO CAPELLA [27:01]

Jadi, jangan sampai ada kesan kami melaporkan Jepang ke Nipon ini, Yang ... Ketua, nanti sama saja.

133. KETUA: SUHARTOYO [27:08]

Itu bagian yang bisa kami pertimbangkan untuk bagaimana ... sebenarnya kan core-nya ada pada gubernur kalau per ... sengketa batas antarkabupaten itu. Tapi kalau jika ada supervisi ataupun semacam itu dari Kementerian Dalam Negeri, kan nanti ... bagaimana nanti MK berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim bisa kemudian mempertimbangkan apa yang Bapak sampaikan itu.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.06 WIB

Jakarta, 5 Maret 2024

Panitera

Muhidin

